



PERKEMBANGAN

PEMBAHASAN

Rancangan Undang-Undang

tentang

Kitab Undang-undang

Hukum Pidana

RUU
KUHAP



Tim Ahli Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SEJARAH PERKEMBANGAN RUU KUHP

*Wetboek van
Strafrecht voor
Netherlands
Indie (WvS)*
Stb No. 732
tahun 1915 dan
mulai berlaku
1 Januari 1918

UU No. 1
tahun 1946
tentang
Peraturan
Hukum
Pidana dan
UU No. 73
tahun 1958
memberlaku
kan WvS
sebagai
Peraturan
Hukum
Pidana
Nasional

Upaya
pembaruan
KUHP
dimulai sejak
1958 yang
ditandai
dengan
berdirinya
Lembaga
Pembinaan
Hukum
Nasional
(LPHN)

Seminar Hukum
Nasional I
tahun **1963** ,
menghasilkan
resolusi antara
lain desakan
untuk
diselesaikannya
KUHP Nasional
Tahun 2015
Pemerintah
melakukan
pembahasan
RUU KUHP
dengan DPR

→ **97 tahun**

Perkembangan PEMBAHASAN RUU KUHP

2012

RUU KUHP pertama kali disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke DPR pada Tahun 2012

2015

Presiden Joko Widodo menyampaikan Kembali ke DPR dan menerbitkan Surat Presiden Nomor **R-35/Pres/06/2015**, tanggal 5 Juni 2015 yang ditindaklanjuti dengan pembahasan secara intensif selama lebih dari 4 (empat) tahun.

**18 September
2019**

Pemerintah dan DPR RI telah menyepakati RUU KUHP dalam Pembahasan Tingkat I untuk dibahas dalam Pembahasan Tingkat II, yakni pengambilan keputusan di Rapat Paripurna.

**26 September
2019**

Pemerintah Menunda Pembahasan RUU KUHP pada Pembahasan Tingkat II

• **Perkembangan RUU KUHP** • **SAAT INI**



- RUU KUHP masuk Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 46/DPR RI/I/2019-2020
- Pemerintah melakukan penyempurnaan dengan melakukan reformulasi dan memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal kontroversial berdasarkan masukan dari berbagai unsur masyarakat serta kementerian/lembaga terkait
- Melaksanakan Sosialisasi melalui Diskusi Publik
- Mendorong RUU KUHP masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021

lanjutan



RUU KUHP hasil Pembahasan Tingkat I terdiri dari **628 pasal** yang terbagi atas 2 Buku, yaitu:

- 1. Buku Kesatu** yang mengatur mengenai Aturan Umum berlakunya Hukum Pidana di Indonesia; dan
- 2. Buku Kedua** yang mengatur mengenai Tindak Pidana



Terima Kasih